



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PERKUATAN DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tanggal, 19 Juni 2008
Pukul 08.30 WIB
Tempat Hotel Kapuas Palace
Jalan Gajah Mada No. 899 Pontianak

Yang saya hormati:

- Dirjen Kesbangpol Depdagri;
- Para pimpinan Partai Politik Provinsi Kalbar;
- Para Narasumber, Tokoh Masyarakat, Peserta;
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita semua dapat menghadiri Pembukaan Sosialisasi Perkuatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat.

Hadirin yang berbahagia.

Situasi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sejak berjalannya reformasi sampai saat ini masih diwarnai dengan fenomena sosial dan politik yang sangat dinamis. Reformasi masih belum dipahami secara baik. Dalam banyak kasus, reformasi sering diartikan sebagai kebebasan yang tidak terkendalikan. Demikian juga dalam memahami otonomi daerah yang tidak komprehensif telah menambah jumlah penyebab rentannya situasi dan kondisi dalam masyarakat.

Beberapa kondisi riil yang seringkali dijumpai akhir-akhir ini adalah adanya isu globalisasi, demokratisasi, transparansi, transformasi iptek, akuntabilitas, penegakan hukum, masalah HAM dan lingkungan hidup serta isu pemulihan perekonomian dalam negeri. Isu-isu tersebut, apabila tidak diselesaikan secara arif, berpotensi berkembang ke arah disintegrasi bangsa.

Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia. Tantangan itu akan sangat terasa terutama ketika Bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Bangsa kita telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, yang menyadarkan kita bersama akan perlunya upaya bersama dari setiap komponen anak bangsa untuk menjaga dan mengawal secara simultan persatuan dan kesatuan bangsa.

Saudara-saudara peserta sosialisasi yang saya hormati.

Menghadapi kondisi tersebut, perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan.

Untuk itu, pada kesempatan ini Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mensosialisasikan posisi strategis Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Demokrasi yang Berwawasan Kebangsaan sebagai pelaksanaan amanat pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa di dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, maka daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memantapkan kerjasama intelijen dan dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas politik, keamanan, serta ketentraman dan ketertiban umum, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dalam hal ini merupakan rujukan bagi Pemerintah Daerah dan aparat intelijen dari berbagai unsur instansi terkait di daerah untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan mensinergikan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, yang dalam hal ini merupakan rujukan bagi pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya dalam wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Bentuk kemitraan seperti ini sangat penting mengingat tidak mungkin setiap saat seluruh perangkat dan jajaran pemerintah daerah dapat mengantisipasi setiap dinamika potensi kerawanan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM, masyarakat dapat memberikan kontribusi positif demi terwujudnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Di sinilah kemitraan antara pemerintah dan masyarakat di dalam informasi dan deteksi dini.

Konstruksi hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat seperti yang dibangun dalam FKDM juga dapat dibangun dalam bentuk yang lain sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan di bidang kerukunan antar umat beragama melalui FKUB difasilitasi dengan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Kemitraan di bidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan difasilitasi dengan Peraturan Mendagri Nomor 34 Tahun 2006.

Melalui kemitraan seperti ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dimaksimalkan dan pada saat yang sama pemerintah daerah dapat menyusun program dan anggarannya dalam APBD secara lebih terarah.

Hadirin yang berbahagia.

Untuk melaksanakan itu semua, sebagai tanggung jawab moral anak bangsa sesuai dengan tugas dan profesinya masing-masing, wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kualitas kebangsaan sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi.

Melalui sosialisasi perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan ini juga kita berharap akan terpatriti semangat kebersamaan yang tinggi di kalangan kita semua akan komitmen saling menghargai dan menghormati, perbedaan kultur dan pendapat, komitmen kepedulian akan permasalahan sosial yang dihadapi sebagian besar masyarakat, komitmen untuk senantiasa belajar untuk menyelesaikan permasalahan secara tertib dibarengi dengan kearifan lokal dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Komitmen kebersamaan untuk bekerjasama secara harmonis, sinergis, efisien dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, marilah kita sebagai anak bangsa, hendaknya bisa berpikir jernih, rasional dan obyektif agar negeri ini terhindar dari perpecahan karena beragam benturan dan kepentingan yang tidak dapat disatupadukan.

Saudara-saudara peserta sosialisasi yang saya hormati.

Sosialisasi perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan ini, merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk mengadakan perbaikan, peningkatan dan pembaharuan terhadap kondisi yang pernah retak dan keruh serta menyumbat peningkatan dan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena sebagaimana kita ketahui bangsa kita pada saat ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan, musibah, tantangan dan ancaman yang bertubi-tubi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.

Maka dalam menghadapi berbagai macam masalah yang sangat kompleks itu pemerintah menyadari bahwa apabila kondisi seperti itu dibiarkan dan tidak dicarikan jalan pemecahannya, dikhawatirkan akan timbul konflik yang terus menerus.

Kita semua harus menyadari, bahwa tantangan yang paling berpotensi menjadi ancaman terhadap kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa sekarang ini justru lebih banyak muncul dari dalam negeri sendiri. Seperti penyebaran isi-isu yang bersifat Sara oleh kelompok-kelompok tertentu yang telah meresahkan ketentraman masyarakat demi kepentingan politiknya.

Isu-isu itu disebar luaskan melalui pernyataan-pernyataan sikap atau ungkapan-ungkapan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan, pertentangan antara suku, agama dan keturunan. Indikasi ini nampak dengan terjadinya kerusuhan-kerusuhan dalam berbagai macam bentuk konflik akhir-akhir ini di beberapa daerah. Apalagi kalau dalam penyelesaiannya menggunakan cara-cara diluar kaidah hukum, lupa bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum sebagai Panglima. Demikian juga dengan apa yang pernah terjadi di Kalimantan Barat.

Hadirin yang saya hormati.

Berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dewasa ini masih tetap merintangangi perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasionalnya, apalagi dalam menghadapi era globalisasi serta adanya semangat reformasi yang berlebihan yang menimbulkan kerawanan dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjaga kelestarian serta integrasi bangsa melalui semangat/jiwa persatuan dan kesatuan merupakan kebutuhan mutlak dan sekaligus merupakan tantangan yang tidak ringan, kondisi baru, tantangan baru dan perubahan-perubahan nilai yang terjadi mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk bersatu karena pada hakekatnya Wawasan Kebangsaan/Wawasan Nusantara merupakan visional bangsa.

Saudara-saudara peserta sosialisasi yang saya hormati.

Saya sebagai Gubernur Kalimantan Barat sangat menyadari betapa banyak permasalahan yang dihadapi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, tetapi dengan misi yang telah diterapkan yaitu "Terwujudnya masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera" yang kemudian diwujudkan melalui 7 prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan perkapita di atas rata-rata kebutuhan hidup minimum.
2. Meningkatnya SDM yang cerdas, beriman dan berbudaya.
3. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lapangan pekerjaan serta meningkatnya produktivitas usaha yang efisien dan efektif.
4. Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan dengan mendorong masuknya investor dalam dari luar negeri.
5. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
6. Meningkatnya pembangunan wilayah pedalaman, pesisir dan kepulauan termasuk meningkatnya pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan.
7. Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.

Maka diharapkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat pula segera diterapkan.

Demikianlah beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan mengawali kegiatan ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Sosialisasi Perkuatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi saya nyatakan "dibuka".

Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



Drs. CORNELIS, MH